

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra OPD Tahun Lalu

Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi dan UMKM Tahun 2016 ini, merupakan turunan dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan UMKM Tahun 2013-2018, atau merupakan dokumen Renja periode ke 3 (tiga) dari rangkaian implementasi Renstra tersebut. Dengan demikian sampai tahun 2016 ini Renstra Dinas KUMKM tahun 2013-2018 akan dijabarkan kedalam 5 (lima) buah Renja, yaitu Renja tahun 2014, Renja tahun 2015, Renja tahun 2016, Renja tahun 2017, dan Renja tahun 2018.

Dalam perkembangannya, Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat telah mengalami revisi pada tahun 2015, sehingga hampir keseluruhan komponen yang terdapat didalam Renstra berubah, mulai dari visi, misi, tujuan, sasaran, indikator kinerja, strategi dan kebijakan. Adapun rincian sasaran strategis yang tercantum didalam Revisi Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebanyak 5 (lima), yaitu :

1. Peningkatan kapasitas KUMKM

Indikator sasaran tersebut adalah :

- a. Jumlah Koperasi Aktif (kumulatif selama 5 tahun sebanyak 17.278 koperasi binaan)
- b. Jumlah UMKM yang telah memiliki legalitas usaha (kumulatif selama 5 tahun sebanyak 384 UMKM)

2. Meningkatnya pertumbuhan KUMKM

Indikator sasaran tersebut adalah :

- a. Persentase Peningkatan Omzet UMKM (persentase per tahun sebesar 5%)
- b. Pertumbuhan skala usaha koperasi (persentase per tahun sebesar 5%)

3. Terbukanya akses pembiayaan bagi KUMKM

Indikator sasaran strategis adalah :

- a. Persentase Kredit yang Diserap oleh Koperasi (%12 pada tahun ke-lima)
- b. Persentase Kredit yang Diserap oleh UMKM (25% pada tahun ke-lima)

4. Meningkatnya minat wirausaha

Indikator sasaran strategis nya adalah :

- a. Jumlah wirausaha baru (kumulatif selama 5 tahun sebanyak 6.300 orang)

5. Meningkatnya kemampuan wirausaha baru

Indikator sasaran strategis adalah :

- a. Persentase wirausaha baru yang menjadi pelaku usaha (rata-rata selama 5 tahun 78%).

Capaian indikator sasaran strategis untuk tahun 2014 di Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat, adalah sebagai berikut :

1. Target jumlah koperasi aktif pada sebanyak 15.000 koperasi. Pada akhir tahun, berdasarkan data agregasi yang diperoleh dari Kabupaten/Kota, menunjukkan bahwa jumlah koperasi aktif sebanyak 15.633 koperasi (104,22%).
2. Target jumlah UMKM yang telah memiliki legalitas usaha sebanyak 180 unit. Pada akhir tahun diperoleh data bahwa jumlah UMKM yang telah memiliki legalitas usaha sebanyak 186 unit (103,3%).
3. Target jumlah UMKM yang telah memasuki pasar internasional (ekspor) sebanyak 80 UMKM, sedangkan hasil yang dicapai sebanyak 88 unit (110%).
4. Target pertumbuhan skala usaha koperasi sebesar 3% dan diperoleh hasil sebanyak 3,9%.
5. Target jumlah koperasi yang layak mengakses pembiayaan sebanyak 85 koperasi, dan pada akhir tahun diperoleh data bahwa jumlah koperasi yang layak mengakses pembiayaan sebanyak 90 koperasi (105,9%).
6. Target jumlah UMKM yang layak mengakses pembiayaan sebanyak 4.500 UMKM, dan pada akhir tahun diperoleh data bahwa jumlah UMKM yang layak mengakses pembiayaan sebanyak 4.897 UMKM (108,8%).
7. Target jumlah wirausaha baru sebanyak 300 orang , dan pada akhir tahun anggaran pelaksanaan telah dilakukan pelatihan pencetak wirausaha baru sebanyak 300 orang (100%).

8. Target persentase wirausaha baru yang menjadi pelaku usaha sebanyak 100%, dan pada akhir tahun anggaran besaran persentase jumlah wirausaha yang menjadi pelaku usaha sebanyak 300 orang (100%).

Sebagai upaya pencapaian target sasaran strategik yang tercantum dalam Renstra Dinas Koperasi dan UMKM Tahun 2013-2015 tersebut diatas, sejak tahun 2014 s.d 2018 telah dijabarkan kedalam 9 (Sembilan) Program sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
2. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
4. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
6. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur;
7. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
8. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah.
9. Program Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah.

Kesepuluh program tersebut yang merupakan program utama adalah :

1. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif KUMKM
2. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi KUMKM

Penjabaran program melalui kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2014 strategis adalah sebagai berikut :

- I. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif KUMKM
 1. Penguatan tatakelola kelembagaan dan usaha koperasi. Target kegiatan sebanyak 1.500 koperasi, dan capaian kinerja sebanyak 1.738 koperasi (115,9%). Pelaksanaan kegiatan menggunakan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.157.658.000,-. Output kegiatan adalah :
 - a. Penguatan kelembagaan koperasi

- b. Penguatan usaha koperasi
- c. Optimalisasi peran koperasi
- d. Pengembangan koperasi besar Jawa Barat menuju koperasi kelas dunia dan koperasi percontohan Jawa Barat

Outcome kegiatan adalah meningkatnya tatakelola kelembagaan, usaha dan jaringan, koperasi perikanan, koperasi percontohan, koperasi skala besar Jawa Barat, stakeholder dan masyarakat lainnya se-Jawa Barat.

2. Peningkatan kemampuan berbasis akuntansi dan manajerial kewirausahaan, dengan target sebanyak 350 orang pengelola KUMKM. Capaian kinerja sebanyak 350 orang pengelola KUMKM (100%), dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 449.325.095,-. Output kegiatan adalah : meningkatnya kemampuan akuntansi dan manajerial kewirausahaan pelaku KUMKM. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kapasitas pelaku KUMKM untuk mendukung pengembangan usaha dan mendukung pengembangan perekonomian Jawa Barat.
3. Pengembangan wirausaha berdaya saing dengan target sebanyak 150 wirausaha. Capaian kinerja sebanyak 200 orang (133,3%) dengan menggunakan alokasi anggaran sebesar Rp. 230.850.000,-. Output kegiatan adalah :
 - a. Pengembangan kapasitas usaha wirausaha
 - b. Optimalisasi pengembangan wirausaha

Outcome kegiatan adalah pengembangan kapasitas usaha dan optimalisasi wirausaha untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Jawa Barat.
4. Pencetak 100 Ribu Wirausaha Baru. Target sebanyak 300 wirausaha, capaian kinerja sebanyak 300 wirausaha (100%), dengan menggunakan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.203.000.000,-. Output kegiatan adalah :
 - a. Seleksi calon wirausaha baru
 - b. Pelatihan teknis substantif dan magang
 - c. Pendampingan usaha wirausaha baru
 - d. Lounching pencetak 100 ribu wirausaha baru Jawa Barat

Outcome kegiatan adalah terserapnya tenaga kerja di Jawa Barat melalui penciptaan wirausaha baru sehingga mendukung pengembangan perekonomian di Jawa Barat.

5. Fasilitasi penguatan akses pasar. Target sebanyak 500 KUMKM, capaian kinerja sebanyak 468 KUMKM (93,6%), dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.468.750.000,-. Outpt kegiatan adalah :

- a. Terlaksananya cooperative fair
- b. Terlaksananya pameran luar provinsi
- c. Terlaksananya temu bisnis

Outcome kegiatan adalah meningkatnya promosi, pemasaran dan perluasan akses pasar produk KUMKM Jawa Barat.

- II. Program Pengembagnan Sistem Pendukung Usaha bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

1. Jabar Cyber Koperasi dan Paviliun KUMKM. Target kinerja sebanyak 2 unit, capain kinerja sebanyak 2 lokasi paviliun KUMKM (100%) dan menggunakan alokasi anggaran sebesar Rp. 498.937.000,-. Output kegiatan adalah :

- a. Penguatan media interaksi koperasi dan UMKM
- b. Pengembangan paviliun penguatan koperasi dan UMKM

Outcome kegiatan adalah berkembangnya jaringan informasi yang dapat dimanfaatkan oleh KUMKM untuk mengembangkan jaringan pemasaran berbasis Informasi Teknologi.

2. Monitoring dan Evaluasi Pemberdayaan KUMKM. Target capaian sebanyak 2.000 KUMKM, capain kinerja sebanyak 2.000 KUMKM (100%) dan alokasi anggaran sebesar Rp. 273.757.000,-. Output kegiatan adalah monitoring kinerja pemberdayaan KUMKM. Outcome kegiatan adalah meningkatnya efektivitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi KUMKM sebagai bahan untuk pengambilan kebijakan.
3. Pendukungn fasilitasi teknologi tepat guna bagi KUMKM. Target yang ingin dicapai adalah 700 KUMKM, capain kinerja sebanyak 500 KUMKM (71,43%) dan menggunakan alokasi anggaran sebesar Rp. 449.875.000,-. Output kegiatan

adalah sosialisasi pemanfaatan teknologi tepat guna. Sedangkan outcome kegiatan adalah meningkatnya kapasitas KUMKM dengan pemanfaatan teknologi tepat guna.

4. Pengembangan akses pembiayaan bagi KUMKM. Target sebanyak 3.150 KUMKM, capaian kinerja sebanyak 1.140 UMK (36,2%) dan alokasi anggaran sebesar Rp. 300.000.000,-. Output kegiatan adalah sosialisasi dan koordinasi dana bergulir, serta publikasi pembiayaan KUMKM. Outcome kegiatan adalah meningkatnya UMK yang layak mengakses pembiayaan khususnya penggunaan dana bergulir di Jawa Barat untuk mendukung pengembangan usaha UMK.

Adapun rekapitulasi evaluasi pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra Dinas Koperasi dan UMKM pada tabel 2.1. Capaian rata-rata kinerja utama sebesar 85,04% dikarenakan alokasi anggaran yang terbatas, sehingga output yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan tidak mampu mencapai target capaian kinerja yang harus dicapai.

Tabel: 2.1

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan
Pencapaian Renstra Dinas KUMKM Provinsi Jawa Barat Tahun 2014**

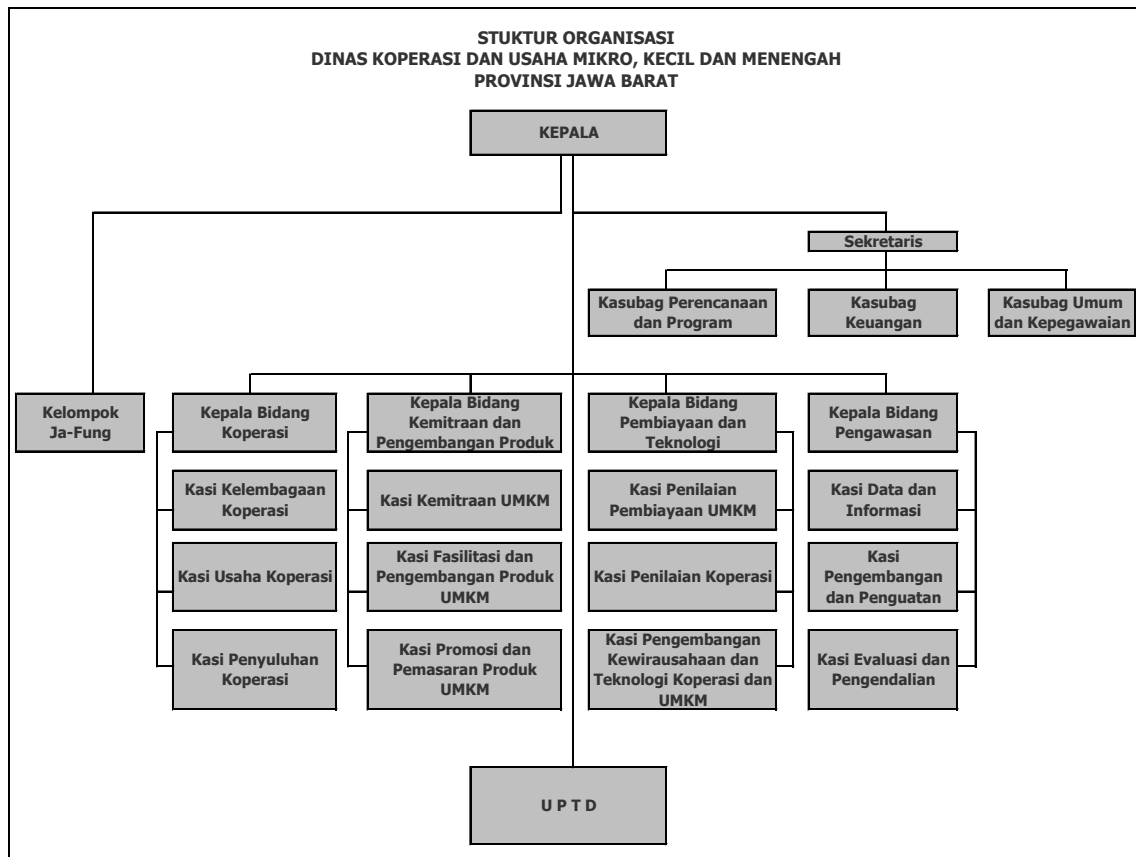
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2008-2013	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013	Target dan Perkiraan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2013			Target program dan kegiatan (Renja OPD Tahun 2015)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2014		Catatan
							Target Renja OPD tahun 2014	Realisasi Renja OPD tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1				Urusan Wajib									
1	15			Bidang Urusan Koperasi dan UMKM									
1	15	30		Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif KUMKM	Berkembangnya kewirausahaan dan keunggulan kompetitif KUMKM di Jawa Barat								
1	15	30	01	Penguatan Tatakelola Kelembagaan dan Usaha Koperasi	Jumlah koperasi yang dibina	1.100	1.100	1.500	1.738	115,9	1.750	1.750	100
1	15	30	02	Peningkatan kemampuan berbasis akuntansi dan manajerial kewirausahaan	Jumlah pengelola KUMKM yang dilatih	200	200	350	350	100	325	325	100
1	15	30	03	Pengembangan Wirausaha Berdaya Saing	Jumlah pelaku UMKM yang dilatih untuk meningkatkan kapasitas usahanya	200	200	150	200	133,3	325	325	100
1	15	30	08	Pencetakan 100 Ribu Wirausaha Baru	Jumlah wirausaha yang dilatih untuk menjadi wirausaha baru	-	-	300	300	100	1.500	1.800	100
1	15	30	11	Fasilitasi Penguatan Akses Pasar	Meningkatnya jaringan pemasaran bagi KUMKM Jawa Barat	437	437	500	468	93,6	600	600	100
1	15	31		Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha	Berkembangnya KUMKM Jawa Barat melalui								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2008-2013	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013	Target dan Perkiraan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2013			Target program dan kegiatan (Renja OPD Tahun 2015)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2014		Catatan
								Target Renja OPD tahun 2014	Realisasi Renja OPD tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					Bagi KUMKM	Pelaksanaan Sistem Pendukung Usaha Bagi KUMKM								
1	15	31	02		Jabar Cyber Koperasi dan Paviliun KUMKM	Tersedianya jaringan pemasaran berbasis Informasi Teknologi bagi KUMKM Jawa Barat	5	5	2	2	100	7	2	100
1	15	31	03		Monitoring dan Evaluasi Pemberdayaan KUMKM	Tersedianya data hasil monitoring dan evaluasi pemberdayaan KUMKM di Jawa Barat	1.000	1.000	2.000	2.000	100	2.000	2.200	100
1	15	31	04		Pendukung Fasilitas Teknologi Tepat Guna bagi KUMKM	Sosialisasi pemanfaatan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kapasitas usaha KUMKM di Jawa Barat	-	-	700	500	71,4	700	900	100
1	15	31	05		Pengembangan Akses Pembiayaan bagi KUMKM	Meningkatnya jumlah KUMKM yang layak mengakses pembiayaan	2.500	2.500	3.150	1.140	36,2	1.140	3.250	100
					RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR UTAMA						85,04			

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2008 tanggal 19 November 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat, bahwa Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1



Adapun berdasarkan peraturan Gubernur Jawa Barat nomor 70 tahun 2009 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit Dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Barat, bahwa Tupoksi Dinas KUMKM adalah sebagai berikut:

- (1) Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan Daerah bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berdasarkan asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Dinas mempunyai fungsi :
- a. Penyelenggaraan perumusan dan penetapan kebijakan teknis urusan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah.
 - b. Penyelenggaraan urusan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah meliputi koperasi, kemitraan dan pengembangan produk UMKM, pembiayaan dan teknologi, pengawasan serta pelatihan.
 - c. Penyelenggaraan pemberdayaan dan pelaksanaan tugas-tugas koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah meliputi koperasi, kemitraan dan pengembangan produk UMKM, pembiayaan dan teknologi, pengawasan serta pelatihan.
 - d. Penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan UPTD
 - e. Penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan
 - f. Penyelenggaraan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Disamping kedua Peraturan tersebut diatas, bahwa tugas pelayanan Dinas KUMKM Provinsi Jawa Barat juga mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dimana berdasarkan PP Nomor 38 tahun 2007 tersebut, bahwa Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah merupakan bagian dari urusan Wajib, dengan rincian kewenangan di tingkat Provinsi adalah sebagai berikut:

1. Kewenangan pada Sub Bidang Kelembagaan Koperasi, meliputi:

- a. Pelaksanaan kebijakan pembentukan, penggabungan, dan peleburan, serta pembubaran koperasi.
- b. Pengesahan dan pengumuman, menyangkut: Pengesahan pembentukan, penggabungan dan peleburan, serta penetapan pembubaran koperasi lintas kabupaten/kota (Tugas Pembantuan); serta Fasilitasi pelaksanaan pengesahan dan pengumuman akta pendirian koperasi lintas kabupaten/kota.

- c. Fasilitasi pelaksanaan pengesahan dan perubahan AD yang menyangkut penggabungan, pembagian dan perubahan bidang usaha koperasi lintas kabupaten/kota.
- d. Fasilitasi pelaksanaan pembubaran koperasi di tingkat provinsi.
- e. Pembinaan dan pengawasan, menyangkut: Pembinaan dan pengawasan KSP dan USP koperasi di tingkat provinsi. Fasilitasi pelaksanaan tugas dalam pengawasan KSP dan USP Koperasi di tingkat provinsi (Tugas Pembantuan).

2. Kewenangan pada Sub Bidang Pemberdayaan Koperasi, meliputi:

- a. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan koperasi meliputi: Penciptaan usaha simpan pinjam yang sehat di tingkat provinsi sesuai dengan kebijakan pemerintah; Bimbingan dan penyuluhan koperasi dalam pembuatan laporan tahunan KSP dan USP lintas kabupaten/kota; Pembinaan KSP dan USP lintas kabupaten/kota; Fasilitasi pelaksanaan pembubaran dan penyelesaian akibat pembubaran KSP dan USP lintas kabupaten/kota; Pemberian sanksi administratif kepada KSP dan USP lintas kabupaten/kota yang tidak melaksanakan kewajibannya;
- b. Pengembangan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan koperasi dalam wilayah provinsi.
- c. Pemberian bimbingan dan kemudahan koperasi lintas kabupaten/kota.
- d. Perlindungan kepada koperasi dalam wilayah provinsi.

3. Kewenangan pada Sub Bidang Pemberdayaan UKM, meliputi:

- a. Penetapan kebijakan pemberdayaan UKM dalam penumbuhan iklim usaha bagi usaha kecil di tingkat provinsi meliputi: Pendanaan/penyediaan sumber dana, tata cara dan syarat pemenuhan kebutuhan dana; Persaingan; Prasarana; Informasi; Kemitraan; Perijinan; Perlindungan.
- b. Pembinaan dan pengembangan usaha kecil di tingkat provinsi meliputi: Produksi; Pemasaran; Sumber daya manusia; Teknologi.

- c. Fasilitasi akses penjaminan dalam penyediaan pembiayaan bagi UKM di tingkat provinsi meliputi: Kredit perbankan; Penjaminan lembaga bukan bank; Modal ventura; Pinjaman dari dana pengasihan sebagai laba BUMN; Hibah; Jenis pembiayaan lain.

4. Kewenangan pada Sub Bidang Pengawasan, Monitoring, dan Evaluasi, meliputi: Pengawasan, monitoring, dan evaluasi upaya pemberdayaan Koperasi dan UKM lintas kabupaten/kota.

Berdasarkan ketentuan Tupoksi dan Kewenangan tersebut diatas, maka kinerja pelayanan Dinas KUMKM Provinsi Jawa Barat telah dilakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagai berikut:

- Jumlah Pertumbuhan Wirausaha, sebanyak 3.000 orang setiap tahunnya
- Jumlah Kelembagaan dan Usaha Koperasi, menjadi 117% dari tahun sebelumnya
- Jumlah Akses Pembiayaan KUMKM terhadap Lembaga keuangan (Bank dan Non Bank), menjadi 114,28% dari tahun sebelumnya
- Jumlah Akses KUMKM terhadap Teknologi Tepat Guna, diberikan kepada 100 KUMKM
- Jumlah Fasilitasi Promosi dan Pemasaran produk KUMKM, menjadi 120% dari tahun sebelumnya
- Jumlah Fasilitasi Kemitraan Usaha KUMKM, menjadi 120% dari tahun sebelumnya
- Jumlah Fasilitasi Pengembangan KUMKM, menjadi 100% dari tahun sebelumnya
- Jumlah SDM KUMKM yang mengikuti Pelatihan, menjadi 112, 5% dari tahun sebelumnya

Adapun kondisi dari tingkat pencapaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan ketentuan yang berlaku, adalah meliputi beberapa hal sebagaimana dijelaskan dalam tabel 2.2 berikut ini:

Tabel: 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas KUMKM Provinsi Jawa Barat

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra OPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di Kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	96.68%	96.68%	96.68%	96.68%	96.68%	96.68%	96.68%	96.68%	
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq. Kementrian/ LPNK	Keberadaan standar operating Procedure (SOP)	Ada, 1 (satu) SOP	Ada, 1 (satu) SOP	Ada, 1 (satu) SOP	Ada, 1 (satu) SOP	Ada, 1 (satu) SOP	Ada, 1 (satu) SOP	Ada, 1 (satu) SOP	Ada, 1 (satu) SOP	
II	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Jumlah Perda yang harus dilaksanakan SKPD menurut peraturan Menteri (PERMEN)	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	93.33%	93.33%	93.33%	93.33%	93.33%	93.33%	93.33%	93.33%	
III	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur Jabatan	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
			Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada 3 jbtn (9 Org)	Ada 3 jbtn (9 Org)	Ada 3 jbtn (9 Org)	Ada 3 jbtn (9 Org)	Ada 3 jbtn (9 Org)	Ada 3 jbtn (9 Org)	Ada 3 jbtn (8 Org)	Ada 3 jbtn (10Org)	
IV	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	Rasio PNS Provinsi	0,82%	0,82%	0,82%	0,82%	0,82%	0,82%	0,82%	0,82%	
			Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
			Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra OPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
V	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD - Renstra SKPD - Renja SKPD - RKA SKPD	3 Jenis Dok	3 Jenis Dok	3 Jenis Dok	3 Jenis Dok	3 Jenis Dok	3 Jenis Dok	3 Jenis Dok	3 Jenis Dok	
		Sinkronisasi Program Renja SKPD dengan Program RKPD	Jumlah Program RKPD yang Diakomodir dalam Renja SKPD	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	8 program
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	Jumlah Program RENJA RKPD yang Diakomodir dalam RKA SKPD	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	8 program
		Perencanaan pelaksanaan program dan anggaran	Jumlah program RENJA SKPD Diakomodir dalam DPA SKPD	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	8 program
VI	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	
		Besaran belanja Modal	Belanja modal terhadap total belanja SKPD	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	
		Besaran belanja pemeliharaan	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	7,99%	7,99%	7,99%	7,99%	7,99%	7,99%	7,99%	7,99%	
			Total belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	3,93%	3,93%	3,93%	3,93%	3,93%	3,93%	3,93%	3,93%	
		Laporan Keuangan SKPD	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)	Ada, sebanyak 3 jenis	Ada, sebanyak 3 jenis	Ada, sebanyak 3 jenis	Ada, sebanyak 3 jenis	Ada, sebanyak 3 jenis	Ada, sebanyak 3 jenis	Ada, sebanyak 3 jenis	Ada, sebanyak 3 jenis	
VII	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset SKPD	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
		Penggunaan Asset SKPD	Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD	21,94 %	21,94 %	21,94 %	21,94 %	21,94 %	21,94 %	21,94 %	21,94 %	

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra OPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
VIII	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas/prasarana partisipasi masyarakat	Jumlah fasilitas/prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil Keliling 5. Pengumuman di mess Media	Jumlah sebanyak 6 Jenis	Jumlah sebanyak 6 Jenis	Jumlah sebanyak 6 Jenis	Jumlah sebanyak 6 Jenis	Jumlah sebanyak 6 Jenis	Jumlah sebanyak 6 Jenis	Jumlah sebanyak 6 Jenis	Jumlah sebanyak 6 Jenis	
		Responsivitas terhadap pasrtisipasi masyarakat	Keberadaan survey kepuasan masyarakat	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
IX	URUSAN KOPERASI DAN UMKM	Koperasi Aktif	Proporsi koperasi aktif terhadap jumlah koperasi di seluruh kab/kota	61,75 %	61,75 %	61,75 %	61,75 %	61,75 %	61,75 %	75 %	90 %	Kop aktif 14.080 Σ Kop 22.803
		Usaha Mikro , Kecil dan Menengah	Proporsi UMKMi aktif terhadap jumlah koperasi di seluruh kab/kota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Σ UMK 8.722.846 (2010)

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Dalam konstelasi Nasional maupun Daerah, keberadaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) telah menunjukkan peranannya yang cukup baik terhadap perekonomian Nasional maupun Daerah, namun demikian masih banyak hambatan dan kendala baik yang bersifat internal maupun eksternal, khususnya dalam aspek kelembagaan, produksi, pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain, teknologi, permodalan, daya saing serta iklim usaha.

Sebagai gambaran dari kondisi perkembangan Koperasi dan UMKM di Jawa Barat, adalah sebagaimana ditunjukkan oleh Tabel berikut ini:

Tabel 2.3
Perkembangan Jumlah Koperasi

No.	Tahun	Jumlah Koperasi (Unit)
1.	2008	22.522
2.	2009	22.664
3.	2010	22.091
4.	2011	23.848
5.	2012	24.916
6.	2013	25.252
7.	2014	25.646

Sumber Data: Kabupaten/Kota

Tabel 2.4
Perkembangan Jumlah Anggota Koperasi

No.	Tahun	Jumlah Anggota (Orang)
1.	2008	4.251.889
2.	2009	4.523.393
3.	2010	4.931.025
4.	2011	5.210.172
5.	2012	5.280.700
6.	2013	5.864.690

Sumber Data: Kabupaten/Kota

Tabel 2.5
Perkembangan Jumlah Modal Koperasi

No.	Tahun	Jumlah Modal
1.	2008	6.446.437.485.000
2.	2009	8.579.455.781.970
3.	2010	4.704.724.837.460
4.	2011	4.205.200.822.000
5.	2012	5.639.327.265.530

Sumber Data: Kabupaten/Kota

Adapun beberapa kondisi lainnya dari perkoperasian di Jawa Barat pada Tahun 2014, adalah : Koperasi Aktif 15.139 unit; Koperasi yang melaksanakan RAT 5.981 unit; Jumlah Manajer 2.971 orang; Jumlah Karyawan 53.000 orang; Volume Usaha: 10.746.226.807,55,-; Asset Rp. 37.395.167.642,11,-; SHU Rp. 1.569.912.761,45,-

Koperasi sebagai organisasi otonom/independen sangat ditentukan oleh partisipasi anggota yang merupakan pemilik dan sekaligus pengguna jasa, yang berdampak terhadap peningkatan sosial ekonomi. Oleh karena itu upaya

pengembangan koperasi dalam pelaksanaannya selalu melibatkan semua unsur terkait, sehingga keberadaan perkoperasian di Jawa Barat dalam gerakan langkahnya harus:

- 1) Dapat memenuhi dan mengembangkan permintaan pasar melalui kegiatan bisnisnya.
- 2) Menyediakan sarana komunikasi sebagai wadah partisipasi sosial ekonomi masyarakat Koperasi
- 3) Bertindak sebagai organisasi otonom yang terlibat secara aktif pada peningkatan sosial ekonomi.
- 4) Memberi sumbangan bagi peningkatan ekonomi anggota Koperasi dan masyarakat
- 5) Memberikan pelayanan yang prima sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan anggota maupun masyarakat.

Disamping lembaga perkoperasian, kondisi perkembangan juga ditunjukan oleh bidang UMKM. Jumlah unit usaha selalu meningkat terutama pada unit usaha dengan skala mikro, yaitu bertambah sebanyak 415.848 unit atau meningkat 4,8 persen. Sebaliknya unit usaha dengan skala kecil mengalami penurunan jumlah, sekitar 0,57 persen. Sedangkan skala menengah mengalami peningkatan jumlah yang tidak terlalu besar, yaitu sebesar 0,65 persen. Usaha besar mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yaitu sebesar 7,25 %.

Tabel 2.6
Jumlah Unit Usaha Menurut Skala dan Lapangan Usaha
Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2012
(unit)

Tahun	Mikro	Kecil	Menengah	Besar	Total
2008	8.108.834	98.332	7.095	1.523	8.215.784
2009	8.410.238	106.751	7.504	1.536	8.526.029
2010	8.616.254	106.592	7.408	1.536	8.731.789
2011	8.626.671	116.062	8.181	1.728	8.752.642
2012	9.042.519	115.749	8.235	1.853	9.168.356

Sumber: BPS Jawa Barat, 2012

Peranan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang ditunjukan dengan PDRB tanpa migas selama periode 2008-2012 cenderung semakin meningkat, pada

tahun 2008 peranannya sebesar 52,55 persen, pada tahun 2009 meningkat menjadi 52,93 persen, pada tahun 2010 meningkat menjadi 53,75 persen dan pada tahun 2011 kembali meningkat 54,20 persen dan pada tahun 2012 meningkat lagi menjadi 54,55 persen. Hal itu menunjukkan kondisi yang terbalik dengan peranan usaha besar, dimana pada tahun 2008 adalah sebesar 47,45 persen, kemudian menurun pada tahun 2009 menjadi 46,25 persen, pada tahun 2010 menurun menjadi 46,25 persen dan menurun lagi menjadi 45,80 pada tahun 2011 dan pada tahun 2012 hanya sebesar 45,55 persen.

Demikian halnya dengan peningkatan kinerja UMKM dari aspek Nilai Tambah Bruto (NTB) selama periode 2008-2011, dimana pada tahun 2008 adalah sebesar 313,67 trilyun meningkat menjadi 348,3 trilyun pada tahun 2009, serta meningkat lagi pada tahun 2010 menjadi 396,5 trilyun, pada tahun 2011 menjadi 446,62 trilyun dan pada tahun 2012 menjadi 495,54 trilyun. Usaha besar juga mengalami peningkatan NTB, dimana pada tahun 2008 adalah sebesar 283,25 trilyun, meningkat pada tahun 2009 sebesar 309,74 trilyun, pada tahun 2010 sebesar 341,15 trilyun, pada tahun 2011 meningkat menjadi 377,47 trilyun dan pada tahun 2012 menjadi 412,91 trilyun.

Jumlah penyerapan tenaga kerja di sektor UMKM pada periode tahun 2010-2012 menunjukkan adanya peranan yang cukup besar dari Usaha Mikro yang mampu mendominasi serapan tenaga kerja, dimana dari 17.382,5 ribu orang yang bekerja di Jawa Barat pada tahun 2012, usaha mikro mampu menyerap 13.861.800 pekerja atau sekitar 79,74% sedangkan selebihnya sebesar 20,53% pekerja menyebar pada unit usaha kecil, menengah dan besar.

Untuk meningkatkan kesempatan, kemampuan dan perlindungan Koperasi, Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah, sejauh ini telah ditetapkan berbagai kebijakan tentang pencadangan usaha, pendanaan, dan pengembangan, namun demikian dalam pelaksanaannya dipandang masih belum optimal, hal ini dikarenakan kebijakan tersebut belum dapat memberikan perlindungan, kepastian berusaha, dan fasilitasi yang memadai untuk pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Beberapa isu penting yang perlu diangkat dalam perumusan kebijakan mendatang antara lain: aspek peningkatan kualitas kelembagaan, aspek produktivitas,

aspek pengolahan, aspek pemasaran, aspek SDM, aspek desain, aspek teknologi, aspek permodalan, aspek daya saing serta aspek iklim usaha.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD Provinsi Jawa Barat tahun 2016 yang telah diterbitkan, memuat berbagai arah kebijakan pembangunan Bidang Koperasi dan UMKM, termasuk didalamnya mengenai rancangan Program dan Kegiatan Bidang Koperasi dan UMKM Tahun 2016.

Dalam rancangan awal RKPD Provinsi Jawa Barat tahun 2016 tersebut, disebutkan bahwa pembangunan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan penjabaran dari Misi-2, yaitu *Membangun Perekonomian yang Kokoh dan Berkeadilan*, dimana tujuan misi kedua tersebut adalah Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan mengurangi disparitas ekonomi antar wilayah, dengan sasaran:

1. Jawa Barat sebagai Daerah Pertanian Berbasis Agrikultur
2. Meningkatnya daya saing usaha pertanian
3. Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi
4. Meningkatnya jumlah dan kualitas wirausahawan
5. Meningkatnya pembangunan ekonomi perdesaan dan regional

Berdasarkan sasaran Misi ke-2, yaitu Meningkatnya jumlah dan kualitas wirausahawan, maka sebagai dasar implementasinya dalam rancangan RKPD Provinsi Jawa Barat tahun 2015 telah dirumuskan Program bidang KUMKM, yang terdiri dari:

1. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dengan sasaran:
 - a. Terfasilitasinya penumbuhan wirausaha baru
 - b. Peningkatan kapasitas SDM KUMKM
 - c. Peningkatan Akses Pembiayaan bagi KUMKM melalui KCR.
 - d. Peningkatan fasilitasi pembiayaan KUMK

- e. Pengembangan dan pendirian Paviliun.
- 2. Program Pengembangan Sistem Pendukung bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dengan sasaran:
 - a. Peningkatan KUMKM berdaya saing;
 - b. Pengembangan Tatakelola kelembagaan koperasi.;
 - c. Peningkatan pemasaran dan pengembangan Jaringan KUMKM;
 - d. Peningkatan akses TTG bagi KUMKM;
 - e. Peningkatan jumlah kop skala besar;
 - f. Peningkatan kop percontohan
- 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan sasaran:
 - a. Tingkat keterampilan, profesionalisme dan pelayanan adm. kepegawaian intern dan ekstern aparatur per tahun.
- 4. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan sasaran:
 - a. Peningkatan pemenuhan kebutuhan Dasar operasional unit kerja Dinas & Balaitkop & UMKM dlm mendukung tupoksi;
 - b. Peningkatan pelayanan antar lembaga dan kepada masyarakat per tahun.
- 5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan sasaran:
 - a. Peningkatan pemenuhan kebutuhan Sarana & prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah per tahun.
- 6. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan sasaran:
 - a. Terpeliharanya sarana dan prasarana operasional OPD;
 - b. Terwujudnya kenyamanan dan pelayanan kepada masyarakat.
- 7. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan sasaran:
 - a. Tersedianya sistem pelaporan capaian kinerja pada unit kerja OPD;
 - b. Tersedianya dokumen operasional OPD yang mendukung capaian kinerja organisasi.
- 8. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah, dengan sasaran:
 - a. Peningkatan ketersediaan data/informasi dan statistik daerah per tahun

9. Program Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah, dengan sasaran:

- a. Meningkatnya sinergitas perencanaan pembangunan daerah;
- b. Tersedianya dokumen perencanaan makro dan sektoral yang pro public.

Adapun berdasarkan arah kebijakan Program tersebut diatas, maka dalam rancangan awal RKPD Provinsi Jawa Barat tahun 2014 telah dirumuskan rincian kegiatan pembangunan Koperasi dan UMKM tahun 2015 sebagaimana yang tercantum dalam tabel 2.7 dibawah ini:

Tabel: 2.7

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2015

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Analisis
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A.	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif KUMKM		1. Terfasilitasinya penumbuhan wirausaha baru dan wirausaha yang berdaya saing dan pengembangan incubator bisnis KUMKM yang dilaksanakan bersama perguruan tinggi dan pelaku bisnis 2. Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi			Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif KUMKM		1. Terfasilitasinya penumbuhan wirausaha baru dan wirausaha yang berdaya saing dan pengembangan incubator bisnis KUMKM yang dilaksanakan bersama perguruan tinggi dan pelaku bisnis 2. Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi			
1.	Kegiatan Jabar Cyber Koperasi dan Paviliun KUMKM	Jawa Barat	Pendirian Paviliun/Grai KUMKM beserta system Informasi	3 Unit	926.000						
2.	Monitoring dan Evaluasi Pemberdayaan KUMKM	Jawa Barat	Kinerja Program dan Kegiatan Pendukung bagi Koperasi dan UMKM	2.000 KUMKM	753.690						

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Analisis
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	Pencetakan 100 Ribu Wirausaha Baru	Jawa Barat	Terciptanya wirausaha baru	6.000 Wirausaha baru	23.100						
4.	Penciptaan Lapangan Kerja Melalui Pelatihan Teknis Substantif	Jawa Barat	Terlatihnya bidang Konveksi, Kulinier/Tata Boga dan Fashion	200 Orang	580.000						
5.	Pendukung Fasilitas Teknologi Tepat Guna bagi KUMKM	Jawa Barat	Tefasilitasinya Akses Teknologi Tepat Guna oleh Koperasi dan UMKM	100 KUMKM	640.000						
6	Peningkatan Kemampuan Berbasis Akuntansi dan Manajerial Kewirausahaan bagi KUMKM	Jawa Barat	Peningkatan Kapasitas SDM KUMKM	1.000 KUMKM	725.000						
7	Tatakelola Pendampingan Fasilitas Lapangan Kerja dan Modal Usaha bagi KUMKM	Jawa Barat	Tatakelola Pendampingan Fasilitas Lapangan Kerja dan Modal Usaha bagi KUMKM	2.000 KUMKM	850.000.						
B.	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi KUMKM		1. Meningkatnya akses permodalan bagi KUMKM dengan jaminan kolateral bekerjasama dengan			Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi KUMKM		1. Meningkatnya akses permodalan bagi KUMKM dengan jaminan kolateral bekerjasama dengan			

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Analisis
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			perbankan dan lembaga keuangan mikro; 2. Meningkatnya akses teknologi tepat guna bagi KUMKM 3. Pengembangan akses pasar melalui promosi dan kreasi produk KUMKM serta dukungan pendampingan tempat usaha					perbankan dan lembaga keuangan mikro; 2. Meningkatnya akses teknologi tepat guna bagi KUMKM 3. Pengembangan akses pasar melalui promosi dan kreasi produk KUMKM serta dukungan pendampingan tempat usaha			
6.	Fasilitasi Pengembangan Usaha KUMKM	Jawa Barat	Peningkatan Kapasitas usaha dan pemasaran KUMKM	40 KUMKM	500.000						
7.	Fasilitasi Penguatan Akses Pasar KUMKM	Jawa Barat	Peningkatan Pemasaran dan Pengembangan Jaringan KUMKM	200 KUMKM	1.000.000						
8.	Pameran Produk KUMKM 2015	Jawa Barat	Perluasan pasar dan jaringan usaha KUMKM	140 KUMKM	1.500.000						
9.	Pengembangan Akses Pembiayaan Bagi KUMKM	Jawa Barat	Akses Pembiayaan KUMK melalui lembaga Keuangan	3500 KUMKM	350.000						
10	Pengembangan Wirausaha Berdaya Saing	Jawa Barat	KUMKM yang berdaya saing	150 KUMKM	598.170						
11	Penguatan Tatakelola	Jawa Barat	Peningkatan	1.000	5.000.000						

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Analisis
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kelembagaan Koperasi		Tatakelola Kelambagaan Koperasi	koperasi							
12.	Pengembangan dan Penguatan KUMKM Tembakau	Jawa Barat	Peningkatan Kelembagaan KUMKM Tembakau	2.000 KUMKM	3.500.000						
C.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		1. Meningkatnya kualitas aparatur daerah 2. Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian 3. Tertatanya regulasi manajemen sumberdaya aparatur daerah			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		1. Meningkatnya kualitas aparatur daerah 2. Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian 3. Tertatanya regulasi manajemen sumberdaya aparatur daerah			
8.	Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan SDM Aparatur	Bandung	a. Tingkat Keterampilan Aparatur; b. Tingkat profesionalisme aparatur c. Tingkat pelayanan administrasi kepegawaian internal dan eksternal	100 %	850.000	Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan SDM Aparatur	Bandung	a. Tingkat Keterampilan Aparatur; b. Tingkat profesionalisme aparatur c. Tingkat pelayanan administrasi kepegawaian internal dan eksternal			
D.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1. Terpenuhinya kebutuhan dasar operasional unit			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1. Terpenuhinya kebutuhan dasar operasional unit			

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Analisis
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			kerja OPD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya 2. Terwujudnya kualitas pelayanan antar lembaga dan kepada masyarakat; 3. Terlaksananya pembenahan system dan prosedur serta standarisasi kualitas pelayanan publik provinsi					kerja OPD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya 2. Terwujudnya kualitas pelayanan antar lembaga dan kepada masyarakat; 3. Terlaksananya pembenahan system dan prosedur serta standarisasi kualitas pelayanan publik provinsi			
9.	Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Dinas KUMKM	Bandung	a. Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD/Balai/ UPT/UPTD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya b. Tingkat pelayanan antar lembaga dan	100 %	1.250.000	Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Dinas KUMKM	Bandung	a. Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD/Balai/ UPT/UPTD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya b. Tingkat pelayanan			

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Analisis
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			kepada masyarakat					antar lembaga dan kepada masyarakat			
10.	Kegiatan Penyelenggaraan Adminsitasi Perkantoran Balai Pelatihan Tenaga KUMKM	Jawa Barat	a. Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD/Balai/ UPT/UPTD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya b. Tingkat pelayanan antar lembaga dan kepada masyarakat	100 %	900.000	Kegiatan Penyelenggaraan Adminsitasi Perkantoran Nalai Pelatihan Tenaga KUMKM	Jawa Barat	a. Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD/Balai/ UPT/UPTD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya b. Tingkat pelayanan antar lembaga dan kepada masyarakat			
E.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		1. Meningkatnya sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat, antara lain melalui pengembangan pilihan layanan bergerak (Mobile Service Option) 2. Terlaksananya upaya pemberian penghargaan			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		1. Meningkatnya sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat, antara lain melalui pengembangan pilihan layanan bergerak (Mobile Service Option) 2. Terlaksananya upaya pemberian penghargaan			

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Analisis
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			kepada masyarakat dan lembaga yang berkontribusi kepada pembangunan Jawa Barat					kepada masyarakat dan lembaga yang berkontribusi kepada pembangunan Jawa Barat			
11.	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas KUMKM	Bandung	Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah	100 %	4.750.000	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas KUMKM	Bandung	Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah			
12.	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Balai Pelatihan Tenaga KUMKM	Bandung	Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah	100 %	850.400	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Balai Pelatihan Tenaga KUMKM	Bandung	Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah			
F.	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur		1. Terpeliharanya sarana dan prasarana operasional OPD; 2. Terwujudnya kenyamanan dan pelayanan kepada masyarakat			Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur		1. Terpeliharanya sarana dan prasarana operasional OPD; 2. Terwujudnya kenyamanan dan pelayanan kepada masyarakat			

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Analisis
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.	Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bandung	a. Tingkat pemeliharaan sarana dan prasarana operasional SKPD/Balai/ UPT/UPTD; b. Tingkat Kenyamanan dan pelayanan kepada masyarakat	100 %	1.000.000	Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bandung	a. Tingkat pemeliharaan sarana dan prasarana operasional SKPD/Balai/ UPT/UPTD; b. Tingkat Kenyamanan dan pelayanan kepada masyarakat			
14.	Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Pelatihan Tenaga KUMKM	Bandung	a. Tingkat pemeliharaan sarana dan prasarana operasional SKPD/Balai/ UPT/UPTD; b. Tingkat Kenyamanan dan pelayanan kepada masyarakat	100 % 100 %	895.400	Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Pelatihan Tenaga KUMKM	Bandung	a. Tingkat pemeliharaan sarana dan prasarana operasional SKPD/Balai/ UPT/UPTD; b. Tingkat Kenyamanan dan pelayanan kepada masyarakat			
G.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		1. Tersedianya system pelaporan capaian kinerja pada unit kerja OPD 2. Tersedianya dokumen operasional OPD yang mendukung capaian kinerja organisasi			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		1. Tersedianya system pelaporan capaian kinerja pada unit kerja OPD 2. Tersedianya dokumen operasional OPD yang mendukung capaian kinerja organisasi			

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Analisis
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.	Kegiatan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Internal SKPD/OPD	Jawa Barat	a.Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kerja SKPD/Balai/UPT/UPTD dengan anggaran; b.Tingkat Ketersediaan Dokumen Operasional	100 % 100 %	150.000	Kegiatan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Internal SKPD/OPD	Jawa Barat	a.Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kerja SKPD/Balai/UPT/UPTD dengan anggaran; b.Tingkat Ketersediaan Dokumen Operasional			
H.	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah		Tersedianya data/informasi a-spasial dan spasial yang mutakhir dan akurat menuju satu data pembangunan Jawa Barat			Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah		Tersedianya data/informasi a-spasial dan spasial yang mutakhir dan akurat menuju satu data pembangunan Jawa Barat			
16.	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Data dan Informasi KUMKM	Jawa Barat	Tingkat Kualitas Data KUMKM hasil pendukungan Dinas	100 %	350.000	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Data dan Informasi KUMKM	Jawa Barat	Tingkat Kualitas Data KUMKM hasil pendukungan Dinas			
I.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah		1. Meningkatnya sinergitas perencanaan pembangunan daerah; 2. Tersedianya dokumen perencanaan makro dan sektoral yang pro publik.			Program Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah		a. Meningkatnya sinergitas perencanaan pembangunan daerah; b. Tersedianya dokumen perencanaan makro dan sektoral yang pro publik.			
17.	Kegiatan Fasilitas	Jawa Barat	Peningkatan	100 %	500.000	Kegiatan Fasilitas	Jawa Barat	Peningkatan			

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Analisis
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Proses Perencanaan dan Koordinasi Pembangunan Bidang KUMKM		Perencanaan Program Pendukung bagi KUMKM			Proses Perencanaan dan Koordinasi Pembangunan Bidang KUMKM Jawa Barat		Perencanaan Program Pendukung bagi KUMKM			
	JUMLAH				41.339.635					101.100.000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana Kerja (Renja) Dinas KUMKM Provinsi Jawa Barat Tahun 2016, disamping memuat rancangan program dan kegiatan yang didasarkan pada penjabaran RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018, juga secara substansial memperhatikan berbagai usulan Program dan Kegiatan yang disampaikan oleh Kabupaten/Kota serta berbagai pihak pemangku kepentingan di bidang KUMKM, melalui mekanisme Forum OPD, Pra Musrenbang Kewilayahan serta Musrenbang Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan hasil penelaahan usulan program dan kegiatan tersebut, sebagai dasar pertimbangan pendanaannya dapat dikelompokkan menurut kategori sebagai berikut:

1. Usulan program dan kegiatan yang dapat diakomodir kedalam Belanja Langsung (BL) OPD - Dinas KUMKM Provinsi Jawa Barat;
2. Usulan program dan kegiatan yang dapat diakomodir kedalam Belanja Tidak Langsung (BTL) melalui mekanisme Bansos dan Hibah;
3. Usulan program dan kegiatan yang dapat diteruskan kedalam usulan APBN.

Adapun hasil dari pengelompokan usulan program dan kegiatan tersebut adalah sebagaimana yang disajikan dalam tabel 2.8 di bawah ini.

Tabel 2.8
Rekapitulasi Usulan Kegiatan Kabupaten/Kota Untuk Tahun Anggaran 2017

NO.	NAMA	KAB. / KOTA	USULAN 2016							
			Prioritas 1	Jumlah	Prioritas 2	Jumlah	Prioritas 3	Jumlah	Prioritas 4	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WILAYAH I									
1	DINAS PERINDAGKOP	KAB. BOGOR	Peningkatan Keterampilan bagi Pengrajin Bambu	4,000,000,000						
2	DINAS KOPPERINDAG	KAB. SUKABUMI	Pengembangan KUMKM Kuliner Produk KUMKM	2,495,500,000	Penataan Kelembagaan Koperasi	1,150,000,000	Pemberdayaan/R evitalisasi Koperasi	575,000,000	Peningkatan Akses Pembiayaan Koperasi dan KSP/USP	1,265,000,000
3	DINAS KUMKM	KAB. CIANJUR	Penilaian Kesehatan KSP/USP, Klasifikasi Koperasi	100,000,000	Identifikasi UMKM	100,000,000	Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	2,500,000,000		
4	DINAS PERINDAGKOP	KOTA BOGOR								
5	DINAS PERINDAGKOP	KOTA SUKABUMI	Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	500,000,000	Fasilitasi Kemudahan Formalisasi Badan Hukum Koperasi	250,000,000				

NO.	NAMA	KAB. / KOTA	USULAN 2016							
			Prioritas 1	Jumlah	Prioritas 2	Jumlah	Prioritas 3	Jumlah	Prioritas 4	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	DINAS KOPERASI, UKM DAN PASAR	KOTA DEPOK								
	WILAYAH II									
1	DINAS KOPERASI DAN PKM	KAB. SUBANG	Validasi Dta UMKM	200,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Pengurus Koperasi	300,000,000	Pengembangan Pengemasan produk unggulan KUMKM Subang	150,000,000		
2	DINAS KUMKM PERINDAG	KAB. PURWAKARTA								
3	DINAS KUMKM	KAB. KARAWANG	Pelatihan Peningkatan desain dan Bantuan Tungku dan Peralatan	1,000,000,000	Penciptaan Wirausaha Baru/ Inkubator Bisnis	1,000,000,000				
4	DINAS KUMKM	KAB. BEKASI								
5	DINAS PERINDAGKOP	KOTA BEKASI								
	WILAYAH III									
1	DINAS KOPERASI DAN UKM	KAB. KUNINGAN								
2	DINAS KOPERASI DAN UKM	KAB. CIREBON								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	DINAS KOPERASI DAN UKM	KAB. MAJALENGKA	Pelatihan Pengawas KSP/USP-Koperasi	150,000,000	Pelatihan Penilai Kesehatan KSP/USP-Koperasi	150,000,000	Pelatihan Registrasi Akta Badan Hukum Koperasi melalui On Line	150,000,000		
4	DINAS KOPPERINDAG	KAB. INDRAMAYU	Fasilitasi Sarana Pendidikan dan Pelatihan KUMKM	5,000,000,000	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Sentra Bisnis Produk Unggulan KUMKM	5,000,000,000				
5	DINAS PERINDAGKOP	KOTA CIREBON	Pelatihan Kewirausahaan	300,000,000	Fasilitasi Halal bagi Produk KUMKM	200,000,000	Pelatihan Akuntansi Koperasi	200,000,000		
	WILAYAH IV Barat									
1	DINAS KOPERASI, UKM DAN PERINDAG	KAB. BANDUNG	Peningkatan Daya saing perekonomian produk unggulan	500,000,000	Pelatihan Perkoperasian bagi Aparatur	200,000,000				
2	DINAS KOPERASI, UKM DAN PENANAMAN MODAL	KAB. BANDUNG BARAT	Rintisan Penerapan Teknologi Sederhana/Manajemen Modern	300,000,000	Penyelenggaraan Sarana Promosi Hasil Produksi	360,000,000	Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	360,000,000		
3	DINAS KUMKM	KAB. SUMEDANG	Pemutahiran/Pemetaan DATA UMKM							
4	DINAS PERINDAGKOP	KOTA BANDUNG								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	DINAS KUMKM, PERINDAG DAN PERTANIAN	KOTA CIMAHI	Pengembangan Sentra Ekonomi berbasis Potensi Lokal	2,200,000,000	Pembinaan Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi	1,100,000,000				
	WILAYAH IV Timur									
1	DINAS PERINDAGKOP	KAB. GARUT								
2	DINAS PERINDAGKOP	KAB. TASIKMALAYA	Bimbingan Teknis dalam rangka peningkatan kualitas SDM Koperasi		Pelatihan Kewirausahaan dan Bimbingan Teknis Usaha Mikro bagi wirausaha Baru, Makanan Olahan serta bantuan sarana produksi		Bintek Pengelolaan Usaha dan Pengawasan bagi KSP/USP		Pengembangan sarana dan Prasarana UMKM	
3	DINAS PERINDAGKOP	KAB. CIAMIS	Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	500,000,000	Penyelenggaraan Pendataan Potensi Usaha Koperasi	300,000,000	Pelatihan manajemen Keuangan KSP/USP	300,000,000	Bimbingan Teknis Kelayakan Usaha bagi KSP/USP	300,000,000
4	DINAS PERINDAGKOP	KOTA TASIKMALAYA	Pembinaan dan Pemantapan Kelembagaan Koperasi		Peningkatan Peranana Gerakan Koperasi		Penanganan Dana Bergulir KUMKM dan PPK-IPM			
5	DINAS PERINDAGKOP	KOTA BANJAR								
6	DINAS PERINDAGKOP	KABUPATEN PANGANDARAN								

Sumber: Hasil jaring aspirasi/usulan pemangku kepentingan

